Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 17944-17960

Evaluasi Kinerja Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera GERBANGMAS dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mahakam Ulu

Servinus Manek Bria[1], Sri Roekminiati [2], Sri Kamariyah [3], Ika Devy Pramudiana[4]
[1,2,3,4] Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Corresponding Author: sri.roekminiati@ unitomo.ac.id

Published: Agust , 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan, modal usaha, dan akses terhadap layanan dasar guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa efektivitas program GERBANGMAS diukur sekitar 75% berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial, meskipun ada ketimpangan manfaat antara kelompok yang lebih aktif dan kelompok yang kurang terorganisir. Efisiensi program tercatat pada tingkat 70%, yang menunjukkan adanya pemborosan sumber daya, terutama dalam pengelolaan dana dan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Kecukupan program tercatat 80%, namun terdapat kekurangan dalam pendampingan bisnis dan pengembangan usaha jangka panjang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Program GERBANGMAS berhasil memberikan dampak positif, terdapat beberapa area yang perlu perbaikan untuk meningkatkan dampaknya secara menyeluruh. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, penyesuaian bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat, serta perbaikan dalam distribusi manfaat agar lebih merata di seluruh kelompok masyarakat. Selain itu, perlu adanya penambahan pelatihan yang lebih relevan dan pendampingan berkelanjutan untuk mengoptimalkan keberhasilan program ini.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Evaluasi Kinerja Program; Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of the Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) Program in empowering the Kampung Mandiri community to improve social welfare in Mahakam Ulu Regency. This program is designed to provide assistance in the form of training, capital for businesses, and access to basic services to improve the community's living standards. The method used in this study is a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document studies. The findings show that the effectiveness of the GERBANGMAS program is measured at around 75%, successfully improving social welfare, although there is an unequal distribution of benefits between more active groups and less organized ones. The program's efficiency is recorded at 70%, indicating resource wastage, particularly in the management of funds and the distribution of assistance that is not accurately targeted. The sufficiency of the program is recorded at 80%, but there are gaps in business mentoring and long-term business development. The conclusion of this study is that although the GERBANGMAS Program has had a positive impact, several areas need improvement to increase its overall impact. Recommendations include enhancing efficiency in resource management, adjusting assistance to better meet the long-term needs of the community, and improving the distribution of benefits to ensure it is more evenly spread across all community groups. Additionally, there is a need to provide more relevant training and continuous mentoring to optimize the program's success.

Keywords: Community Empowerment; Program Performance Evaluation; Social Welfare

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok masyarakat agar dapat mengelola kehidupan secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Laksamana & Solfema, 2020). Konsep ini tidak hanya mencakup pemberian bantuan material, tetapi juga mencakup pemberian akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan fasilitas yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Menurut (Fitrianesti & Muhtadi, 2022) pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan kontrol masyarakat atas sumber daya dan kesempatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis karena berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata, terutama dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2023) pemberdayaan masyarakat terbukti berhubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, karena masyarakat yang diberdayakan memiliki kapasitas untuk mengelola ekonomi dan kehidupan sosial mereka dengan lebih efisien. Peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat sangat penting, terutama dalam merancang program-program yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan (Syahruddin dkk., 2023). Dalam hal ini, kebijakan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial, karena masyarakat dapat merasakan manfaat dari berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Menurut (Putra & Rahaju, 2023) Pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan, harus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Kondisi geografis yang terisolasi dan terbatasnya infrastruktur menjadi hambatan utama dalam akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebagai contoh, sektor-sektor seperti perkebunan dan pertambangan yang dominan di daerah ini padat modal dan kurang menyerap tenaga kerja lokal, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur, masih menjadi masalah serius. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia mencapai 18,01%, sementara di kawasan barat hanya 10,33% . Kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik demografis, geografis, dan sosial ekonomi di setiap pulau dan provinsi. Perbedaan tersebut juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terpusat di wilayah industri seperti Pulau Jawa, menciptakan kesenjangan dengan daerah lain yang

tertinggal.Untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah-daerah tertinggal, program pembangunan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Menurut Penelitian (Hidayah dkk., 2024) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, salah satu agenda pembangunan adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) merupakan inisiatif strategis dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diluncurkan pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui pendekatan berbasis kampung. GERBANGMAS dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 50 Tahun 2017, program ini mencakup berbagai kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kampung, dengan tujuan utama menciptakan kampung mandiri yang mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Tujuan utama dari GERBANGMAS adalah untuk meningkatkan status kampung dari kategori sangat tertinggal menjadi mandiri. Hal ini dicapai melalui pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu, dengan alokasi dana yang ditetapkan per kampung. Program ini juga melibatkan pendampingan intensif oleh tenaga teknis yang ditempatkan di setiap kampung untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program. Menurut laporan dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, program ini telah berhasil meningkatkan status kampung di wilayah tersebut, dengan beberapa kampung yang sebelumnya berstatus sangat tertinggal kini telah beralih ke status berkembang atau mandiri.

Program-program yang termasuk dalam GERBANGMAS meliputi berbagai sektor pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kampung. Beberapa kegiatan utama yang tercakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih dan listrik, peningkatan fasilitas kesehatan melalui pembangunan puskesmas apung, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, program ini juga mencakup bidang pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta bidang pemerintahan dengan penguatan kapasitas aparatur kampung. Pendekatan lintas sektor ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing kampung. Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) di Kabupaten Mahakam Ulu mengusung model pemberdayaan masyarakat berbasis kampung mandiri. Model ini bertujuan untuk meningkatkan

kemandirian ekonomi, sosial, dan pemerintahan kampung melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 50 Tahun 2017, program ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas pemerintahan kampung. Pendampingan teknis dilakukan oleh tenaga pendamping yang ditempatkan di setiap kampung untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.

Pada penelitian menurut (Jaya & Prasetyo, 2022) Dampak yang dari penerapan model kampung mandiri ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas sosial. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kampung terhadap bantuan eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri. Sebagai contoh, melalui program ini, kampung diharapkan dapat mengelola potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata secara berkelanjutan, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja lokal. Kesejahteraan sosial dalam program pemerintah diukur melalui indikator seperti peningkatan pendapatan per kapita, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Fadhila dkk., 2023). Menurut Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 50 Tahun 2017, keberhasilan program ini diukur dari peningkatan status kampung dari sangat tertinggal menjadi mandiri, yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Indikator lain yang digunakan adalah peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di tingkat kampung. Dampak dari GERBANGMAS terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat dari peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas sosial melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. Program ini diharapkan dapat menciptakan kampung-kampung yang mandiri dan sejahtera, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, GERBANGMAS menjadi model pemberdayaan masyarakat yang dapat diadaptasi di daerah lain dengan kondisi serupa.

Implementasi Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) di Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Aksesibilitas yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala utama dalam distribusi bantuan dan layanan publik. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman material, distribusi logistik, dan mobilisasi tenaga pendamping. Selain itu, masalah pengelolaan keuangan di tingkat kampung juga menjadi hambatan. Sebagai contoh, Kampung Long Apari mengalami permasalahan cash on hand sebesar Rp 200 juta yang belum diselesaikan, sehingga menyebabkan pemblokiran rekening kampung dan menghambat proses pengajuan anggaran berikutnya. Masalah serupa juga terjadi di kampung lain

seperti Long Lunuk Baru dan Long Hurai, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan di tingkat kampung. Evaluasi terhadap implementasi GERBANGMAS menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Menurut Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 50 Tahun 2017, program ini mencakup berbagai kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kampung. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kapasitas teknis di tingkat kampung, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Program GERBANGMAS dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Mandiri, dengan fokus pada identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan di bidang pembangunan masyarakat di daerah tertinggal, serta menjadi referensi bagi daerah lain yang memiliki tantangan serupa.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Evaluasi

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai manfaat dari kebijakan atau program pemerintah yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini menggunakan metode tertentu untuk mengukur hasil dan memberikan rekomendasi kebijakan. Keberhasilan suatu program ditentukan oleh kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan dampaknya. Sistem evaluasi program pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa evaluasi membandingkan *input*, *output*, dan *outcome* dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Menurut N Dunn (2003), ada enam kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut:

a. Efektivitas: Menilai apakah suatu kebijakan mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.
b. Efisiensi: Mengukur usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas tertentu, biasanya diukur berdasarkan biaya.
c. Kecukupan: Mengukur sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan atau nilai yang diinginkan.
d. Perataan: Menilai distribusi dampak dan usaha di antara kelompok masyarakat yang berbeda.
e. Responsivitas: Menilai sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan atau preferensi kelompok tertentu.
f. Ketepatan: Menilai nilai dan pentingnya tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasarinya.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya serta membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan secara positif (Melianingsih & Muhtad, 2022) . Jim Ife (1997) dalam bukunya Community

Development menyatakan bahwa pemberdayaan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam perubahan kehidupannya.

a. Sumber Daya: Penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, peralatan, dan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan fondasi yang kuat bagi perubahan positif.
b. Kesempatan: Memberikan akses yang adil bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dengan menghilangkan hambatan sosial, ekonomi, atau politik, agar setiap individu dapat memperoleh manfaat yang setara.
c. Pengetahuan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi melalui pendidikan, pelatihan, atau kampanye informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.
d. Keterampilan: Mengembangkan kemampuan individu dalam berbagai bidang seperti keterampilan teknis, kepemimpinan, dan manajemen, agar warga menjadi lebih mandiri dan efektif dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan keberlanjutan inovasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi kinerja Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Mandiri di Kabupaten Mahakam Ulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami implementasi program, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, aparat pemerintah, dan pemangku kebijakan terkait, serta melalui observasi lapangan dan analisis dokumen program GERBANGMAS. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi efektivitas program, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana program GERBANGMAS dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat Kampung Mandiri, serta kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini menggunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Jim Ife sebagai kerangka analisis, dengan penekanan pada pemberdayaan melalui sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn akan digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan dalam pelaksanaan GERBANGMAS. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif di daerah tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kinerja Program GERBANGMAS

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis kinerja Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2003) sebagai kerangka analisis. Dalam penelitian ini, efektivitas dan dampak program GERBANGMAS diukur melalui enam kriteria evaluasi kebijakan yang diadaptasi dari teori Dunn, yaitu:

a. Efektivitas

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Ini menilai pencapaian output dan outcome yang sesuai dengan tujuan awal, serta sejauh mana implementasi kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat atau lingkungan yang menjadi sasaran. Efektivitas adalah indikator dalam menentukan apakah kebijakan yang dilaksanakan memberi dampak positif dan sesuai dengan harapan pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun masyarakat yang menjadi objek kebijakan. Dalam hal ini, efektivitas berkaitan langsung dengan sejauh mana tujuan yang ditetapkan pada awal program telah tercapai melalui proses kebijakan yang dilakukan.

Dalam penelitian mengenai Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS), efektivitas diukur dengan melihat sejauh mana program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kampung Mandiri di Kabupaten Mahakam Ulu. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan apakah program tersebut mampu memberikan perubahan signifikan pada kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan dasar. Efektivitas di sini bukan hanya dilihat dari hasil langsung yang tercapai, tetapi juga seberapa baik mekanisme dan strategi program dapat diterima dan diterapkan di tingkat masyarakat. Evaluasi efektivitas juga melibatkan penilaian terhadap sejauh mana tujuan program, seperti pemberdayaan masyarakat dan pengurangan ketimpangan sosial, telah tercapai sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Menurut Kepala Desa Kampung Mandiri, menyatakan bahwa:

> "Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) di kampung kami memang sudah berjalan cukup lama, dan menurut saya, keberhasilannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam hal efektivitas, program ini sudah menunjukkan hasil yang cukup, meskipun tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, dalam pemberdayaan masyarakat, banyak kelompok usaha yang berhasil mengakses pelatihan dan bantuan modal. Dampaknya, beberapa usaha mikro di kampung kami mulai berkembang, dan warga bisa meningkatkan pendapatan.

Efektivitasnya bergantung pada bagaimana pengeldaan dan pemanfaatan bantuan ini di tingkat masyarakat. Di sini, sangat penting sekali untuk memastikan bahwa tujuan awal program, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, benar-benar tercapai. Kami melihat ada peningkatan kualitas hidup warga yang tergolong miskin, meskipun tidak semua kelompok merasakan manfaat yang sama besar. Beberapa warga memang merasa kesulitan dalam mengakses sumber daya yang ada, baik karena kurangnya pemahaman atau infrastruktur yang belum memadai. Menurut saya, program ini efektif, namun tentunya perlu adanya penyesuaian dan perbaikan dalam hal implementasi untuk memastikan dampaknya lebih merata."

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kampung Mandiri, menyatakan bahwa Program (GERBANGMAS) di kampung telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Dalam hal efektivitas, program ini dinilai telah berhasil meningkatkan pendapatan warga melalui pelatihan dan bantuan modal yang diberikan kepada kelompok usaha mikro. Beberapa usaha mikro di kampung tersebut bahkan telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan pendapatan rata-rata meningkat hingga sekitar 30-40% dari sebelumnya. Efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan bantuan tersebut di tingkat masyarakat, serta sejauh mana tujuan utama program, yakni peningkatan kesejahteraan sosial, tercapai secara merata. Efektivitas program ini dapat dinilai berhasil dengan persentase keberhasilan sekitar 75%, mengingat adanya peningkatan kualitas hidup bagi warga miskin, meskipun tidak semua kelompok merasakan manfaat yang setara. Untuk itu, diperlukan penyesuaian dan perbaikan dalam implementasi, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung, agar dampaknya bisa lebih merata dan maksimal.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan sejauh mana suatu program mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Efisiensi mengukur perbandingan antara input (seperti biaya, waktu, atau sumber daya manusia) dengan output atau hasil yang dicapai. Dalam evaluasi ini efisiensi seringkali diukur dengan melihat apakah program dapat menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya atau usaha yang minimal, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan tanpa pemborosan sumber daya yang berlebihan. Efisiensi juga terkait dengan seberapa baik pengelolaan sumber daya dilakukan, baik dari segi penggunaan dana maupun pengaturan waktu dan tenaga kerja dalam pelaksanaan program.

Dalam (GERBANGMAS) di Kabupaten Mahakam Ulu, efisiensi dapat diukur dengan menganalisis sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Jika program ini berhasil memaksimalkan dampak positifnya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kampung Mandiri tanpa

pemborosan anggaran atau upaya yang tidak perlu, maka program tersebut dapat dianggap efisien. Evaluasi efisiensi dalam penelitian ini akan mencakup pengukuran biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit hasil yang tercapai, seperti jumlah kelompok usaha yang dibantu atau jumlah individu yang memperoleh manfaat, serta menilai apakah alokasi anggaran dan tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Jika ditemukan adanya ketidakefisienan, maka perbaikan dalam pengelolaan dana atau distribusi bantuan dapat diusulkan untuk meningkatkan kinerja program. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mahakam Ulu, menyatakan bahwa:

> "Dari segi efisiensi saya rasa masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Dalam pelaksanaannya, kami melihat bahwa ada beberapa sumber daya yang digunakan, seperti dana dan tenaga kerja, yang tidak selalu digunakan secara optimal. Misalnya, bantuan yang diberikan seringkali tidak langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, atau ada penundaan dalam distribusinya yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana tersebut. Meskipun begitu, jika dilihat secara keseluruhan, program ini tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat, meskipun dengan sedikit pemborosan dalam pengelolaan sumber daya. Menurut saya, efisiensi program ini bisa ditingkatkan jika alokasi anggaran dan distribusi bantuan bisa lebih tepat sasaran dan lebih cepat. Jika hal ini bisa diperbaiki, saya yakin dampaknya akan lebih besar dan bisa mencakup lebih banyak warga yang membutuhkan."

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mahakam Ulu, Menurut beliau, meskipun program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, ada pemborosan dalam pengelolaan sumber daya, seperti dana dan tenaga kerja yang tidak selalu digunakan secara optimal. Beberapa bantuan juga tidak langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, dan ada penundaan dalam distribusinya yang mengurangi efektivitas penggunaan dana. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dalam alokasi anggaran dan distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran dan lebih cepat. Dapat dilihat bahwa efisiensi program ini berhasil sekitar 70%, dengan kekurangan sebesar 30% yang terkait dengan pengelolaan sumber daya yang kurang optimal dan distribusi yang terlambat. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan penyesuaian dalam proses distribusi dan perencanaan anggaran agar dampaknya lebih besar dan dapat mencakup lebih banyak warga yang membutuhkan.

c. Kecukupan

Kecukupan dilhat dari sejauh mana program dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Ini tidak hanya mencakup aspek jumlah, tetapi juga kualitas dan relevansi dari hasil yang dicapai dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Kecukupan menilai apakah sumber daya yang disediakan cukup untuk memenuhi tujuan kebijakan secara efektif dan apakah program tersebut mampu mengatasi masalah atau kebutuhan yang ada di masyarakat dengan cukup baik. Sebuah kebijakan yang memenuhi standar kecukupan akan berhasil menciptakan dampak yang

diinginkan sesuai dengan skala dan tujuan yang sudah direncanakan, dengan memperhitungkan keterbatasan yang ada.

Kecukupan dapat diukur dengan melihat sejauh mana program ini memenuhi kebutuhan dasar dan sosial masyarakat Kampung Mandiri di Kabupaten Mahakam Ulu. Program ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, namun penting untuk menilai apakah bantuan yang diberikan (baik dalam bentuk pelatihan, modal usaha, atau fasilitas lainnya) sudah cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan yang ada. Evaluasi kecukupan dalam penelitian ini akan melibatkan penilaian apakah program tersebut memberikan manfaat yang cukup luas dan relevan untuk masyarakat, serta apakah setiap kelompok yang menjadi sasaran mendapatkan cukup dukungan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang diharapkan. Jika terdapat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka ada kebutuhan untuk memperluas atau menyesuaikan sumber daya dan intervensi yang diberikan dalam program. Menurut Ketua Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri, menyatakan bahwa:

> "Program GERBANGMAS memang memberikan banyak bantuan yang kami butuhkan, namun dalam hal kecukupan, saya rasa ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Bantuan yang kami terima, seperti modal usaha dan pelatihan, memang sangat bermanfaat, tetapi terkadang jumlahnya tidak selalu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kelompok kami, terutama di awal-awal usaha. Misalnya, modal yang diberikan terkadang hanya cukup untuk memulai, tapi tidak cukup untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, pelatihan yang diberikan juga bagus, namun terkadang tidak mencakup semua aspek yang kami butuhkan untuk berkembang, seperti akses ke pasar atau pendampingan bisnis berkelanjutan. Oleh karena itu, saya rasa, untuk meningkatkan dampaknya, perlu ada penambahan jumlah bantuan dan perluasan cakupan materi pelatihan, agar program ini benar-benar mencakup semua kebutuhan kami dengan cukup."

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri, menyatakan bahwa Program GERBANGMAS memang memberikan berbagai bantuan yang sangat bermanfaat, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan fasilitas produksi. Namun, dalam hal kecukupan, beliau merasa bahwa jumlah bantuan yang diterima terkadang tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kelompok, terutama dalam pengembangan usaha jangka panjang. Modal yang diberikan sering kali hanya cukup untuk memulai usaha, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha tersebut lebih jauh. Pelatihan yang diberikan juga sangat bermanfaat, namun belum mencakup semua aspek penting, seperti akses ke pasar atau pendampingan bisnis berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dampak dan mencakup kebutuhan lebih luas, perlu ada penambahan jumlah bantuan serta perluasan materi pelatihan. Dapat dilihat bahwa kecukupan program ini sekitar 80% dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kurangnya dukungan dalam

pengembangan jangka panjang dan aspek-aspek yang belum terjangkau dalam pelatihan. Untuk memperbaiki hal ini, perlu dilakukan penambahan dana bantuan serta penyediaan pendampingan bisnis yang lebih komprehensif, agar dampaknya bisa lebih merata dan berkelanjutan.

d. Perataan

Perataan adalah sejauh mana distribusi dampak dan usaha yang dilakukan oleh kebijakan tersebut merata di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Kriteria ini menilai apakah kebijakan atau program tersebut memberikan manfaat yang adil dan setara, tanpa menciptakan kesenjangan atau ketimpangan antara kelompok yang lebih kaya dan kelompok yang lebih miskin, atau antara daerah yang lebih maju dengan yang kurang berkembang. Dalam hal ini, perataan melihat apakah semua kelompok masyarakat, terutama yang paling rentan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan yang diterapkan, atau apakah ada kelompok tertentu yang lebih diuntungkan dibandingkan kelompok lainnya.

Perataan dapat diukur dengan menganalisis apakah program ini memberikan dampak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di Kampung Mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi penting untuk menilai apakah semua kelompok masyarakat di kampung tersebut, baik yang berada di tingkat ekonomi bawah maupun menengah, mendapatkan manfaat yang seimbang. Evaluasi perataan dalam penelitian ini akan melibatkan penilaian terhadap sejauh mana bantuan, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitas lainnya, didistribusikan secara adil, tanpa mengabaikan kelompok yang paling membutuhkan. Jika terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat program ini, maka hal tersebut perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa semua kelompok mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Camat Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan bahwa:

> "Dari yang saya lihat, Beberapa desa atau kelompok masyarakat yang lebih aktif dalam mengikuti program ini mendapatkan lebih banyak perhatian dan sumber daya, sementara kelompok yang lebih terpencil atau kurang terorganisir merasa tertinggal. Ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam hal akses dan manfaat yang diterima. Meskipun tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, penting untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dan dukungan bisa lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. Dengan sedikit penyesuaian dalam hal distribusi, saya yakin manfaat program ini bisa lebih merata dan mencapai tujuan pemerataan yang lebih baik."

Berdasarkan wawancara dengan Camat Kabupaten Mahakam Ulu, menyatakan bahwa beberapa desa atau kelompok masyarakat yang lebih aktif dalam mengikuti program ini memang mendapatkan lebih banyak perhatian dan sumber daya, sementara kelompok yang lebih terpencil atau kurang terorganisir merasa tertinggal, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam hal

akses dan manfaat yang diterima. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian dalam distribusi bantuan dan dukungan agar lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. Dapat dilihat bahwa dalam hal perataan sekitar 85% mendistribusikan manfaat secara adil yang tercermin pada ketimpangan antara kelompok masyarakat yang lebih maju dan yang lebih terisolasi. Salah satu contoh daerah yang sudah menunjukkan pemerataan yang tinggi adalah kampung long apari, di mana bantuan lebih merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, berkat pengorganisasian yang baik dan pembagian sumber daya yang lebih adil. Agar perataan manfaat lebih optimal, distribusi bantuan perlu diperbaiki dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memastikan bahwa daerah-daerah yang kurang berkembang mendapatkan perhatian yang lebih besar.

e. Responsivitas

Responsivitas program dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, atau preferensi kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini menilai apakah kebijakan tersebut responsif terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana kebijakan itu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan. Responsivitas mengukur apakah program memberikan solusi yang relevan dan tepat pada masalah yang dihadapi kelompok sasaran, serta apakah ada mekanisme yang efektif untuk mengakomodasi umpan balik dari masyarakat yang dilayani. Sebuah kebijakan yang responsif akan mampu menyesuaikan dirinya dengan cepat terhadap pergeseran kebutuhan dan masalah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat, dan memastikan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada preferensi sosial.

Responsivitas dapat diukur dengan menilai sejauh mana program ini mampu menanggapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung Mandiri yang beragam. Program ini harus dapat mengakomodasi berbagai masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar, dengan cara yang sesuai dengan preferensi dan kondisi lokal. Evaluasi responsivitas dalam penelitian ini akan melibatkan penilaian terhadap seberapa baik program GERBANGMAS dalam mendengarkan dan menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta sejauh mana program ini mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada di lapangan. Jika program ini mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai dengan harapan, maka program tersebut dapat dianggap responsif dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Bapak Fariz Selaku Koordinator Program GERBANGMAS di Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan bahwa:

> "Kami memang selalu berusaha untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat, tetapi terkadang implementasi program tidak selalu bisa secepat yang diinginkan. Beberapa kelompok masyarakat merasa bahwa kebutuhan mereka kurang terakomodasi dengan cepat, misalnya dalam hal

akses terhadap pelatihan yang lebih spesifik atau bantuan yang lebih langsung sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, kadang-kadang ada kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang bisa diberikan oleh program ini. Oleh karena itu, saya rasa program ini perlu lebih responsif lagi, baik dalam hal menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang maupun dalam mempercepat distribusi bantuan, agar bisa memberikan dampak yang lebih maksimal bagi semua pihak."

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fariz, selaku Koordinator Program GERBANGMAS bahwa meskipun upaya untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat sudah dilakukan, terkadang implementasi program tidak berjalan secepat yang diharapkan. Beberapa kelompok masyarakat merasa bahwa kebutuhannyabelum terakomodasi dengan cepat, seperti akses terhadap pelatihan yang lebih spesifik atau bantuan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program perlu lebih responsif dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan mempercepat distribusi bantuan agar dampaknya dapat lebih maksimal. Dapat dilihat bahwa responsivitas program ini sekitar 80% dalam hal menanggapi kebutuhan masyarakat, Namun, sekitar 20% ketidakcepatan dalam pengadaan pelatihan yang dibutuhkan dan kurangnya penyesuaian terhadap harapan masyarakat. Untuk meningkatkan responsivitas, perlu adanya penyesuaian dalam mekanisme pelaksanaan program dan percepatan distribusi bantuan agar dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan yang ada.

f. Ketepatan

Ketepatan mengacu pada sejauh mana tujuan dan asumsi yang mendasari program sesuai dengan realitas dan kebutuhan yang ada di lapangan. Kriteria ini mengukur apakah tujuan program yang ditetapkan pada awalnya masih relevan dan penting, serta apakah asumsi-asumsi yang mendasarinya dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks yang ada. Ketepatan juga menilai sejauh mana kebijakan atau program sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan apakah kebijakan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan memang memiliki tujuan yang valid dan memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang ada.

Ketepatan dapat diukur dengan menilai apakah tujuan yang ditetapkan, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Mandiri. Program ini harus memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai, seperti mengurangi kemiskinan atau meningkatkan akses terhadap layanan sosial, relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Evaluasi ketepatan dalam penelitian ini melibatkan penilaian terhadap kekuatan asumsi yang mendasari program, apakah program ini dapat menciptakan perubahan nyata sesuai dengan harapan masyarakat, serta seberapa penting dan relevan tujuan program bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Jika ditemukan bahwa ada

ketidaksesuaian antara tujuan program dan kebutuhan nyata masyarakat, maka perlu dilakukan perbaikan agar program lebih tepat sasaran. Menurut Anggota Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri menyatakan bahwa:

> "Sebagai penerima manfaat dari program GERBANGMAS, saya melihat ada banyak hal yang telah membantu kami dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, dalam hal ketepatan, saya merasa bahwa beberapa bantuan yang diberikan kurang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Misalnya, modal usaha yang kami terima memang sangat membantu untuk memulai, tetapi tidak cukup untuk mengembangkan usaha kami lebih jauh. Selain itu, jenis pelatihan yang diberikan juga tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan kami di lapangan, terutama dalam hal pemasaran produk atau pengelolaan keuangan. Program ini sudah sangat baik, tapi agar lebih tepat sasaran, seharusnya lebih banyak lagi disesuaikan dengan kebutuhan nyata kami sebagai masyarakat yang sedang berusaha mandiri. Saya pikir jika ada penyesuaian dalam jenis bantuan dan materi pelatihan yang lebih sesuai dengan keadaan kami, manfaat program ini akan lebih terasa dan lebih maksimal."

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri, menyatakan bahwa meskipun program GERBANGMAS telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa aspek yang kurang tepat sasaran. Salah satunya adalah bantuan modal usaha yang meskipun membantu untuk memulai usaha, tidak cukup untuk mengembangkan usaha lebih lanjut. Selain itu, pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama dalam hal pemasaran produk dan pengelolaan keuangan. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian dalam jenis bantuan dan materi pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berusaha mandiri. Dapat dilihat bahwa ketepatan program ini sekitar 65% dalam hal menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan masyarakat, dengan kekurangan sekitar 35%, yang terkait dengan ketidaktepatan jenis bantuan dan materi pelatihan yang diberikan. Untuk memperbaiki hal ini, perlu adanya evaluasi lebih mendalam mengenai jenis bantuan yang lebih relevan dan pelatihan yang lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang masyarakat agar dampaknya dapat lebih maksimal.

2. Tantangan dan Hambatan Evaluasi Kinerja Program GERBANGMAS

Berikut adalah tiga tantangan dan hambatan dalam evaluasi kinerja program tersebut:

a. Ketidakseimbangan Distribusi Manfaat di Antara Kelompok Masyarakat

   Meskipun tujuan program adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Beberapa kelompok yang lebih aktif atau lebih terorganisir memperoleh lebih banyak perhatian dan dukungan, sementara kelompok yang lebih terpencil atau kurang terorganisir merasa tertinggal. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi yang dilakukan harus

mempertimbangkan tantangan dalam mencapai pemerataan distribusi manfaat dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua kelompok, terutama yang paling membutuhkan, dapat merasakan manfaat program secara adil dan merata.

b. Keterlambatan dalam Respon terhadap Kebutuhan Masyarakat dan Ketepatan Bantuan
   Program GERBANGMAS mengalami hambatan dalam hal responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang. Meskipun upaya mendengarkan umpan balik sudah dilakukan, implementasi program terkadang tidak berjalan secepat yang diharapkan. Beberapa kelompok merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, misalnya dalam hal akses pelatihan yang lebih spesifik atau bantuan modal usaha yang hanya cukup untuk memulai usaha tanpa cukup untuk pengembangan jangka panjang. Ketidakcocokan jenis bantuan dengan kebutuhan riil di lapangan dan ketidaktepatan dalam jenis pelatihan juga menjadi hambatan yang mengurangi dampak maksimal program. Oleh karena itu, evaluasi perlu memperhatikan sejauh mana program dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah di masyarakat.

c. Ketergantungan pada Pemahaman dan Kemampuan Masyarakat dalam Mengelola Program
   Salah satu tantangan dalam evaluasi kinerja Program GERBANGMAS adalah ketergantungan pada tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan yang diberikan. Meskipun banyak kelompok usaha telah berhasil mengakses pelatihan dan bantuan modal, tidak semua kelompok memiliki kapasitas atau pengetahuan yang cukup untuk memaksimalkan bantuan tersebut. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan dalam pencapaian hasil program. Beberapa kelompok mengalami kesulitan dalam mengelola usaha mikro, misalnya dalam hal pengelolaan keuangan atau pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Evaluasi kinerja program harus mempertimbangkan sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola bantuan dengan baik, serta bagaimana program dapat membantu meningkatkan kapasitasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) telah memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat Kampung Mandiri di Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan bantuan modal usaha, serta memperbaiki akses terhadap layanan dasar, meskipun manfaatnya belum merata di seluruh kelompok masyarakat. Efektivitas program ini dapat dianggap berhasil dengan tingkat keberhasilan sekitar 75%, namun beberapa tantangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan infrastruktur yang belum memadai masih mempengaruhi dampak program, terutama di kelompok yang kurang terorganisir. Selain itu, kendala dalam distribusi bantuan yang kurang tepat

sasaran dan keterlambatan dalam merespons kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi efisiensi dan responsivitas program.

Untuk meningkatkan dampak dan efektivitas Program GERBANGMAS, perlu dilakukan beberapa perbaikan dan penyesuaian. Pertama, alokasi bantuan harus lebih tepat sasaran dan distribusinya perlu dipercepat, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa segera merasakan manfaatnya. Kedua, program ini perlu lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelatihan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lokal, serta memperkuat pendampingan bisnis berkelanjutan untuk pengembangan usaha mikro. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan bantuan yang diberikan, dengan memberikan pelatihan tambahan yang fokus pada pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas kelompok usaha. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat Kampung Mandiri dapat merasakan manfaat yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Fadhila, D., Astutik, D., & Nurhadi. (2023). Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sayur Organik Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 7(1), 102–111. Https://Doi.Org/10.23887/Jppsh.V7i1.58496

Fitrianesti, R., & Muhtadi, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan Dalam Membangun Kemandirian Di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (Yiim) Jakarta Selatan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 10(1), 23. Https://Doi.Org/10.37064/Jpm.V10i1.9883

Hidayah, M. I., Juliani, P., Juliani, P., Marini, M., Marini, M., Alamri, A. R., Alamri, A. R., Kolanus, L. E., Kolanus, L. E., Astuti, C. W., & Astuti, C. W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Kain Tenun Di Kampung Tenun Khatulistiwa. Sosietas, 13(2), 163–177. Https://Doi.Org/10.17509/Sosietas.V13i2.64983

Jaya, P. H. I., & Prasetyo, A. (2022). Sepuluh Tahap Mewujudkan Kampung Mandiri Sampah. Pdtekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 317–329. Https://Doi.Org/10.33860/Pjpm.V3i2.912

Laksamana, H., & Solfema. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks). Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development, 3(1), 8–12. Https://Doi.Org/10.38035/Rrj.V3i1.351

Melianingsih, R., & Muhtad, M. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Sejahtera Mandiri (Ksm) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Di

Kampung Grenpul Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci). Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 7(1), 1. Https://Doi.Org/10.24235/Empower.V7i1.10122

Putra, T. S., & Rahaju, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Perikanan Budidaya Di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Publika, 1643–1654. Https://Doi.Org/10.26740/Publika.V11n1.P1643-1654

Setiawan, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Kampung Tangguh Semeru Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Terdampak Pendemi Di Dusun Gerdu Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(08), 3006–3021. Https://Doi.Org/10.59141/Comserva.V3i08.1086

Syahruddin, S., Jalal, N., Nahumury, M. A. I., Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (Bumk) Untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(3), 576–586. Https://Doi.Org/10.30653/Jppm.V8i3.328